



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Edisi 07/ Juli 2018

ISSN : 2085-4862



EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bilal Dewansyah | Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka
Ratu Durotun Nafisah | Keengganan Dan Dampaknya

Utang Rosidin | Lembaga Penasehat Presiden Dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Lailani Sungkar | Tipologi Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Pusaran
Abdurachman Satrio | Politik Dan Hukum : Kajian Pada Putusan Tentang Pemilu Serentak

Ali Abdurahman | Haruskah Hierarki Peraturan Perundang - Undangan Dinormakan?
Rahayu Prasetianingsing

Susi Dwi Harijanti | Hak Atas Kewarganegaraan : Telah Kritis Atas Putusan Mahkamah
Wicaksana Dramanda | Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Efik Yusdiansyah | Implikasi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap
Integritas Hakim Di Indonesia

W.M. Herry Susilowati | Revitalisasi Keberadaan MPR RI Dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia Pasca Era Reformasi

Nia Kania Winayanti | Rekonstruksi Makna Hak Menguasai Negara Berdasarkan
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan
Ketahanan Ekonomi Nasional

Inna Junaenah | Representasi Fungsional Melalui Utusan Golongan
Dalam Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Indra Perwira | Pergeseran Semu Fungsi Pembentukan Undang-Undang
Mei Susanto | Pada Perubahan UUD 1945
Adnan Yazar

Badan Pengkajian

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Badan Pengkajian MPR RI

2018

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : DR. (H.C.) Zulkifli Hasan, SE., M.M.
DR. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
DR. Hidayat Nur Wahid, M.A.
DR. (H.C.) Oesman Sapta Odang
DR. Ahmad Basarah, M. H.
H. . Ahmad Muzani
DR. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : DR. Bambang Sadono, S.H., M.H.
Prof. DR. Hendrawan Supratikno
H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. H. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan;

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Riswandi; Rindra Budi Priyatmo;
Dian Kartika Sari; Widhi Aditia Putra; Bayu Nugroho; Wafistrietman Corris;
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih; Rani Purwati Kemala Sari;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270
Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420
E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Kata Pengantar Pimpinan Redaksi	III
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	IX
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	XII
Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka Keengganan Dan Dampaknya - Bilal Dewansyah - Ratu Durotun Nafisah	1
Lembaga Penasehat Presiden Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Utang Rosidin	13
Tipologi Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Pusaran Politik Dan Hukum : Kajian Pada Putusan Tentang Pemilu Serentak - Lailani Sungkar - Abdurrachman Satrio	25
Haruskah Hierarki Peraturan Perundang - Undangan Dinormakan? Ali Abdurahman - Rahayu Prasetyaningih	37
Hak Atas Kewarganegaraan : Telaah Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Susi Dwi Harijanti - Wicaksana Dramanda	49
Implikasi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Integritas Hakim Di Indonesia - Efik Yusdiansyah	61
Revitalisasi Keberadaan MPR RI Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Era Reformasi - W.M. Herry Susilowati	77
Rekonstruksi Makna Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional - Nia Kania Winayanti	89
Representasi Fungsional Melalui Utusan Golongan Dalam Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat - Inna Junaenah	101
Pergeseran Semu Fungsi Pembentukan Undang - Undang Pada Perubahan UUD 1945 - Indra Perwira - Mei Susanto - Adnan Yazar	111

LEMBAGA PENASEHAT PRESIDEN DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Utang Rosidin¹

Abstrak

Lembaga penasehat Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sebutan Dewan Pertimbangan Presiden, yang kedudukannya berada di bawah Presiden, dengan fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Sebagai konsekuensi dari kedudukannya yang berada di bawah Presiden, maka fungsi kepenasihatatan dan pertimbangan yang dimilikinya tidak berpengaruh terhadap kebijakan Presiden. Setelah lahirnya Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, maka keberadaan sejumlah staf ahli, staf khusus, maupun penasehat Presiden yang lainnya sebagai lembaga di lingkungan kekuasaan Presiden yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden seharusnya diiadakan, sebab tugas dan fungsinya sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Kata Kunci: Lembaga Negara, Penasehat, Pertimbangan.

Abstract

The President's advisory body in the Indonesian constitutional system is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Presidential Advisory Council, whose position is under the President, with the function of

1) Anggota Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI), Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Bandung, Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung, S1 Ilmu Hukum UIN Bandung (2003), S2 Ilmu Hukum UNPAD (2009), dan S3 Ilmu Hukum UNPAD (2014), email, utangrosidin@uinsgd.ac.id

giving advice and consideration to the President. As a consequence of his position under the President, his advisory functions and considerations do not affect the President's policies. After the establishment of the President's Advisory Council as an institution tasked with giving advice and consideration to the President, I argue that the existence of a number of expert staff, special staff, and other advisors to the President as an institution within the President's authority whose duty to give advice and consideration to the President should be abolished. The rationale is because the function has been stated in Law Number 19 of 2006 concerning the Presidential Advisory Council.

Keywords: State institution, Advisor, Consideration.

PENDAHULUAN

Setelah dilaksanakannya amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002, beberapa lembaga negara baru dibentuk, di antaranya adalah Komisi Yudisial (KY)², Mahkamah Konstitusi (MK)³, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)⁴, dan yang terakhir dibentuk adalah Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES)⁵. Landasan konstitusional Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang

selanjutnya diatur dalam undang-undang. (hasil Perubahan Keempat)⁶.

Pasal ini merubah Pasal 16 sebelumnya yang tercantum dalam Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung. Pasal 16 yang lama itu dihapus, kemudian diganti dengan Pasal 16 seperti dikutip di atas, hanya saja setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16 ini merupakan bagian dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara⁷.

Eksistensi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dalam UUD 1945 berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, dengan Perubahan Keempat UUD 1945 eksistensinya dihapuskan dari lembaga tinggi negara menjadi lembaga di dalam pemerintahan

negara.⁸ Namun demikian, meskipun kelembagaannya dihapuskan, fungsi kepenasihatian tetap dipertahankan dengan pengaturan baru melalui perumusan baru Pasal 16 Perubahan Keempat UUD 1945. Sesuai dengan kebutuhan, Presiden diberi hak konstitusional untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang diberikan tugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan.⁹

Tugas ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 yang menyatakan bahwa, "Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga Pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden dibutuhkan agar Presiden tidak memerintah secara otoriter dan dalam pengambilan keputusan relatif lebih objektif. Akan tetapi, sebaik apa pun nasihat itu, semuanya tergantung kepada Presiden, tidak ada kewajiban Presiden untuk melaksanakan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.¹⁰ Salah satu argumen mengapa pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden tidak mengikat adalah karena Dewan Pertimbangan Presiden

berkedudukan di bawah Presiden.¹¹ Oleh karena itu, jika nasihat itu diharapkan mengikat, seharusnya kedudukan penasihat tidak boleh berada di bawah kewibawaan yang diberi nasihat. Karena itu, kedudukannya harus diresmikan berada dalam derajat yang sama dengan yang diberi nasihat.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden ?
2. Bagaimanakah keberadaan sejumlah staf ahli, staf khusus, maupun penasehat presiden yang lainnya setelah terbentuknya Dewan Pertimbangan Presiden ?

Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden

Tugas Dewan Pertimbangan Presiden adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUD 1945 hasil Perubahan Keempat yang menyatakan "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang".

1) Anggota Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI), Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Bandung, Jl. AH, Nasution No. 105 Bandung, S1 Ilmu Hukum UIN Bandung (2003), S2 Ilmu Hukum UNPAD (2009), dan S3 Ilmu Hukum UNPAD (2014). email. utangrosidin@uinsgd.ac.id

2) Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945

3) Pasal 24C UUD 1945

4) Pasal 22C dan 22D UUD 1945

5) Berdasarkan Pasal 16 UUD 1945

6) Perubahan Keempat tanggal 10 Agustus 2002

7) Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 2

8) Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, h. 129

9) Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 154

10) Editorial Media Indonesia, *Sembilan Pendekar Penasihat Presiden*, Media Indonesia, 3 April 2007

11) Hukumonline.com, 18 Desember 2006

12) Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Op.cit, h. 23

Tugas ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga Pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selain itu, tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2006, yaitu :

- (1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
- (2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.
- (3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya mempunyai peranan yang penting. Hal ini dibuktikan dari adanya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak awal penetapannya.¹³

Presiden membutuhkan suatu badan yang dapat memberikan nasihat dan pertimbangan, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa untuk mengatasi berbagai permasalahan negara yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini dan yang akan datang.¹⁴

Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara¹⁵. Pelaksanaan tugas dan fungsi pertimbangan yang dimiliki oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat mengikuti

sidang kabinet dan mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan¹⁶.

Setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden berhak menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan kepada Presiden. Nasihat dan pertimbangan tersebut harus ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersangkutan. Selain itu, nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden diajukan secara lembaga oleh Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan rapat yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang kemudian ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan Presiden dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Ketentuan mengenai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden diatur melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.¹⁷

Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden

Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 16 ini merupakan pasal hasil amandemen UUD 1945, yang mengatur tentang eksistensi Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara telah dibentuk sejak tahun 1945 melalui Pengumuman Pemerintah tertanggal 25 September 1945.¹⁸ Pada waktu itu jumlahnya hanya sebelas orang, yang diketuai oleh Margono Djojohadikusumo.

Lembaga DPA kemudian tidak dikenal dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950; barulah setelah kembali ke UUD 1945, keberadaan DPA timbul lagi, yang dibentuk melalui Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Pengaturan yang lebih lengkap mengenai DPA ini baru terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967 pada tanggal 5 Mei 1967, kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1978.¹⁹

¹³) Pandangan dan Pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden, diambil dari <http://www.legalitas.org>

¹⁴) Komisi Konstitusi, *Buku 1 Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2004, h. 53

¹⁵) Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2006

¹⁶) Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 tahun 2006

¹⁷) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2007

¹⁸) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No.4

¹⁹) Jindy Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Op.cit, h. 21

Pengaturan tentang Dewan Pertimbangan Agung yang terdapat dalam Pasal 16 Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung tersebut, dengan Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002 dihapus dan diganti dengan rumusan baru, seperti dikutip di atas. Ketentuan Pasal 16 baru ini tidak lagi ditempatkan dalam Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung. Bab IV dengan judulnya itu sudah dinyatakan dihapuskan. Sebagai gantinya, rumusan baru Pasal 16 ini ditempatkan menjadi bagian Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara. Dengan demikian, keberadaan lembaga baru ini berada dalam lingkup cabang kekuasaan pemerintahan negara. Posisi strukturalnya tidak lagi seperti kedudukan DPA di masa lalu yang diperlukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang sederajat dengan Presiden/Wakil Presiden, DPR, MA, dan BPK.²⁰

Penghapusan Pasal 16 rumusan lama dengan rumusan Pasal 16 hasil perubahan didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan lembaga negara DPA yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam kedudukan sejajar. Namun Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan itu. Hal

ini menunjukkan keberadaan DPA sebagai lembaga negara setingkat Presiden yang tidak efektif dan tidak efisien.

Mekanisme penetapan pertimbangan oleh DPA harus melalui prosedur pembahasan dalam pengambilan putusan dalam Sidang DPA sehingga membutuhkan waktu atau tidak dapat dilakukan secara serta merta apabila Presiden membutuhkan pertimbangan yang cepat. Untuk itu, ketentuan UUD 1945 Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. Sebagai gantinya, dirumuskan ketentuan Pasal 16 yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dan berkedudukan di bawah Presiden. Oleh karena itu, ketentuan ini dimasukkan ke dalam Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang di dalamnya mengatur tentang Kekuasaan Presiden. Hal ini juga didasari oleh hasil pengkajian bahwa secara fungsional lembaga kepenasehatan sesungguhnya berada dalam rumpun eksekutif²¹.

Demikian juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 menempatkan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden berkedudukan di bawah Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 yang menyatakan "Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas yang menempatkan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden di bawah Presiden, diharapkan pelaksanaan tugas suatu dewan pertimbangan akan lebih efektif dan efisien karena langsung berada di bawah pimpinan dan koordinasi Presiden. Selain itu, suatu dewan pertimbangan memang dibentuk untuk memberikan dukungan secara terus menerus kepada Presiden agar lebih sukses dalam melaksanakan tugasnya²².

Kedudukan lembaga penasihat Presiden yang berada di bawah Presiden sebenarnya telah terjadi pada tahun 1959, yaitu ketika Dewan Pertimbangan Agung diatur berdasarkan Penetapan Presiden RI (Pnps) No.3/1959 Tentang Dewan Pertimbangan Agung (L.N.No.78/1959 dan T.L.N. No.1917). Menurut ayat (1) Penetapan Presiden tersebut, anggota Dewan Pertimbangan Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Karena itu kedudukannya bergantung sepenuhnya kepada Presiden, seperti halnya Menteri-Menteri Negara. Oleh karenanya menjadi pertanyaan, dapatkah para anggota dewan tersebut mengemukakan pendapat

dengan bebas. Lebih-lebih apabila yang dikemukakan itu menyangkut kebijaksanaan Pemerintah/Presiden.²³

Namun sebagai konsekuensi kedudukannya yang berada di bawah Presiden, maka nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden tidak mengikat²⁴. Karena itu kedudukannya bergantung sepenuhnya kepada Presiden, seperti halnya Menteri-Menteri Negara. Oleh karenanya menjadi pertanyaan, dapatkah para anggota dewan tersebut mengemukakan pendapat dengan bebas, lebih-lebih apabila yang dikemukakan itu menyangkut kebijaksanaan Pemerintah/Presiden²⁵.

Sebenarnya, kalau nasihat dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden diharapkan akan mempengaruhi terhadap kebijakan Presiden, seharusnya kedudukan penasihat tidak boleh berada di bawah kewibawaan yang diberi nasihat. Karena itu, kedudukannya harus diresmikan berada dalam derajat yang sama dengan yang diberi nasihat²⁶. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden secara struktural sebaiknya berada sejajar dengan Presiden, sebab bagaimana mungkin nasihat dan pertimbangan akan disampaikan kepada Presiden, apabila kedudukannya di bawah Presiden, sedangkan masukan dan saran dari

²⁰) Ibid

²¹) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2008, h. 76

²²) Ibid

²³) Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 143

²⁴) Hukumonline.com, 18 Desember 2006

²⁵) Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Op.cit, h.143

²⁶) Jimly Ass-shiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Op.cit, h. 23

bawah sudah banyak disampaikan dari para pembantu Presiden²⁷.

Menempatkan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden di bawah Presiden, berarti dapat dikatakan bahwa lembaga penasihat yang sejak semula diharapkan memiliki kedudukan yang sederajat dengan yang diberi nasihat, dengan maksud agar nasihat-nasihat yang diberikannya tidak hanya bersifat sukarela, melainkan memiliki daya ikat yang cukup kuat terhadap penerima nasihat tidak dapat terwujud melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden ini.²⁸

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik.

Eksistensi Lembaga Penasehat Presiden Setelah Dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden

Tugas Dewan Pertimbangan Presiden adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Tugas ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 19 tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga Pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebenarnya bukan suatu hal baru yang ditugaskan pada suatu lembaga. Sebut saja seperti Komisi Hukum Nasional (KHN) yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2000 bertugas memberikan pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah. Selain itu juga membantu presiden memberikan pendapat tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional. Sementara untuk membantu memberikan pendapat kepada Presiden, dibentuk juga staf-staf ahli di berbagai kementerian, selain beberapa dewan yang dibentuk berdasarkan bidangnya seperti dewan ekonomi dan dewan maritim.

Sejumlah komisi dan staf yang ada di sekitar presiden sendiri saat ini jumlahnya sudah cukup banyak. Sebagai contoh misalnya terdapat Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2000. Komisi Kepolisian Nasional yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara RI dan Komisi Kejaksaan RI yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Masih ada lagi lembaga-lembaga seperti Dewan Maritim Indonesia, Dewan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Nasional.

Selain itu masih bisa ditambah dengan staf khusus Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden, yang berjumlah sembilan orang. Jumlah staf khusus itu masih dapat bertambah lagi karena Presiden dapat mengangkat staf khusus lainnya dengan sebutan Penasihat Khusus Presiden atau Utusan Khusus Presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006, presiden juga membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan dan Program Reformasi.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, maka eksistensi sejumlah staf ahli, staf khusus, maupun penasehat presiden lainnya yang dibentuk oleh Presiden seharusnya ditiadakan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 yang menyebutkan, "Dengan diundangkannya undang-undang ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Berdasarkan pada ketentuan di atas, tentunya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan

sejumlah staf ahli, staf khusus, maupun penasehat presiden yang lainnya tidak bisa diberlakukan, karena ketentuan yang mengaturnya diatur dalam sebuah Keputusan Presiden, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam suatu undang-undang yang merupakan amanat perubahan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah tidak ada alasan lagi bahwa lahirnya Dewan Pertimbangan Presiden yang sudah jelas diatur tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 16 UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006, maka eksistensi semua lembaga penasehat yang ada di sekitar Presiden, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 seharusnya ditiadakan. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi kinerja dari Dewan Pertimbangan Presiden, yang diharapkan akan mampu memberikan nasihat-nasihat dan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dengan efektif.

KESIMPULAN

1. Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga penasehat Presiden yang lahir berdasarkan Perubahan Keempat UUD 1945, mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, berkedudukan di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara.

²⁷) Pendapat ini disampaikan oleh Muladi dalam Risalah Rapat Panitia Khusus RUU tentang Dewan Penasehat Presiden dan RUU tentang Kementerian Negara, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kamis, 9 Februari 2006, di Gedung Nusantara II Paripurna LLI

²⁸) *Ibid*

2. Keberadaan sejumlah penasehat presiden yang lainnya sebagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan pemerintah, setelah lahirnya Dewan Pertimbangan Presiden seharusnya ditiadakan, sebab tugas dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 yang diberikan tugasnya kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FHUII Press, Yogyakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN FH UI, Jakarta, 2002
- _____, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- _____, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Mahfud M.D, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Moedjanto. G, *Konsep Kekuasaan Jawa*, Kanisius, Jakarta, 1987
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Soewargo Kartodihardjo, *Peranan Dewan Pertimbangan Agung dalam Rangka Memperlancar Tugas Presiden*, Laporan Penelitian FH-UGM, Yogyakarta, 1987
- Sri Soemantri, 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- _____, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 2006

B. Makalah dan Artikel :

- Baharudin Aritonang, *Dewan Pertimbangan Presiden*, dalam Sinar Harapan, 11 April 2007
- Ismail Sunny, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*, Seminar tentang Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 29 - 31 Mei 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat*

UUD Tahun 1945, Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

D. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

E. Lain-lain

Komisi Konstitusi, *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2004

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2008